

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki perairan yang sangat luas dan di dalamnya terdapat pula beraneka ragam sumber daya, yaitu sumber daya perikanan dengan segala jenisnya dan segala macam kekayaan alam lainnya. Begitu juga dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan memberikan kewenangan terhadap pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengesahaan sumber daya kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru. Undang-Undang No 23 Tahun 2014, terdapat juga pembagian urusan wajib dan urusan pilihan. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang untuk meningkatkan pengelolaan perikanan budidaya, dan yang kedua bagaimana solusi atas hambatan yang dialami Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang hasil penelitian ini kemudian dijabarkan dengan deskriptif analitis yang dilengkapi dengan bahan hukum primer, data sekunder, dan bahan hukum tersier serta hasil wawancara langsung dengan Kepala Dinas Perikanan Budidaya, lokasi penelitian di Pemerintah Kota Semarang.

Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang untuk meningkatkan pengelolaan perikanan budidaya Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Budidaya secara Optimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas SDM, pengelolaan potensi perikanan budidaya secara optimal Pengembangan Perikanan, melalui program-program yang dilaksanakan yaitu program pengembangan perikanan budidaya, program pengembangan sistem penyuluhan perikanan, program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan terkhusus pada budidaya perikanan. Hambatan yang dialami Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang dilihat dari beberapa aspek yang meliputi pemanfaatan lahan budidaya ikan, tidak adanya pemberian bantuan peralatan pada masyarakat pembudidaya, pemanfaatan

lahan, tingginya abrasi, pendangkalan, kurangnya minat masyarakat, dan juga pengadaan lahan. Penulis mendapatkan kesimpulan bahwasannya dengan adanya berbagai peraturan yang ada seharusnya pengelolaan perikanan budidaya dapat berjalan dengan maksimal, namun realitas berkata lain karena penerapan model pengelolaan konvensional belum berjalan optimal.

Kata kunci: **Pengelolaan, Perikanan budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan**